

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA
MELALUI KONSEP *COMMUNITY BASED TOURISM*
DAN *SUSTAINABLE TOURISM***

Muhammad Iqbal¹,

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

Email: baraasiqbalbaraas@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country rich in tourism, so the tourism industry is growing rapidly in Indonesia. Tourism in Indonesia is currently one of the pillars of the Indonesian economy. Indonesia is also currently a tourist destination that is increasingly famous not only among local tourists, but the beauty of Indonesian tourism has been passed on to people in various countries in the world. The progress of tourism goes hand in hand with the rapid development carried out in tourism areas to support tourism infrastructure. However, currently the existence of tourism and its development is still not able to provide great benefits for the surrounding community. In fact, several provinces which are the prima donna of tourism in Indonesia are still provinces with high poverty rates. This study uses a type of library research. The data sources in this study are primary sources and secondary sources. Data collection techniques use documentation, namely reviewing or interpreting written material based on the context. The results of this study indicate that Community-based tourism is a concept of community-based tourism, in CBT the community is empowered to manage their own attractions. One form of CBT is the development of tourist villages.

Keywords: Tourist Village, *Community Based Tourism*, *Sustainable Tourism*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang kaya akan pariwisata, sehingga industri pariwisata berkembang pesat di Indonesia. Pariwisata di Indonesia saat ini menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Indonesia juga saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang semakin terkenal tidak hanya dikalangan wisatawan lokal saja, namun keindahan pariwisata Indonesia sudah diwariskan kepada masyarakat di berbagai negara di dunia. Kemajuan pariwisata berjalan seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan di kawasan pariwisata untuk mendukung infrastruktur pariwisata. Namun, saat ini keberadaan pariwisata dan perkembangannya masih belum mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Bahkan beberapa provinsi yang menjadi primadona pariwisata di Indonesia masih merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, hal ini bisa disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih banyak dikuasai oleh investor. Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder, Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu mengkaji atau menginterpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Community based tourism merupakan konsep pariwisata berbasis masyarakat, dalam CBT masyarakat diberdayakan untuk mengelola atraksinya sendiri. Salah satu bentuk CBT adalah pengembangan desa wisata.

Kata Kunci : Desa Wisata, Komunitas, CBT, Pengembangan,

Accepted: September 10 2022	Reviewed: September 25 2022	Published: November 30 2022
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Pariwisata adalah salah satu sektor pertumbuhan ekonomi tercepat dan terbesar di dunia saat ini. Industri pariwisata *pensupply* 1/3 dari lapangan pekerjaan di negara-negara berkembang dan meliputi 30% dari nilai *export* jasa di seluruh dunia yang menghasilkan rata-rata USD 3 Miliar per hari dari keseluruhan nilai *export* (Bessie, 2019).

Pertumbuhan pariwisata di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan *trend* yang cukup tinggi, hal ini ditunjang dengan berbagai program branding dan marketing yang dilakukan oleh Kementerian pariwisata Indonesia di berbagai tempat untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan khususnya wisatawan asing ke Indonesia.

Trend pariwisata dunia sendiri saat ini adalah meningkatkan kepedulian terhadap keberlangsungan obyek wisata sendiri dan meminimalkan ekses negatifnya dengan konsep *sustainable tourism* dan *ecotourism* yang menyatukan pelestarian lingkungan alam, komunitas dan meningkatkan kesejahteraannya (Nafah & Purnaningrum, 2021), serta meningkatkan kapasitas serta memberikan edukasi kepada komunitas lokal (Ross & Wall, 1999: 203), *Ecotourism* sangat penting menghadapi menurunnya kondisi destinasi wisata alam yang kian hari kian menunjukkan penurunan fungsinya akibat banyaknya kunjungan wisatawan dan pengelola yang terus *exploitasinya* tanpa memikirkan keberlangsungan destinasi itu untuk masa yang akan datang. *Ecotourism* akan meningkatkan kesadaran baik masyarakat di sekitar destinasi maupun pengunjung untuk bersama-sama menjaga dan melindungi lingkungan alam sekitar serta adat dan budaya lokal untuk keberlangsungannya.

Destinasi-destinasi alam ini kebanyakan terletak di daerah pedesaan yang biasanya dikembangkan oleh pemerintah setempat bekerja sama dengan

perusahaan setempat dan jarang melibatkan masyarakat secara luas dalam pengelolaannya. *Ecotourism* mencakup prinsip-prinsip dasar pariwisata secara keberlanjutan yang menimbulkan dampak secara ekonomi, sosial dan lingkungan yang banyak ahli sepakat merupakan *alternative* pendekatan pembangunan pariwisata saat ini (Garraway, 2008: 89).

Ecotourism menawarkan manfaat ekonomi yang terlihat secara nyata misalnya peningkatan pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, sarana dan prasarana yang biasanya tidak terjangkau di daerah pinggiran yang memiliki jarak jauh dengan perkotaan. Berbagai atraksi alam yang berada di daerah ini hanya tersedia di tempat-tempat tertentu dan setelah menarik kunjungan wisatawan harus dibangun fasilitas pendukungnya. Masyarakat yang berada di daerah pinggiran ini pun biasanya hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki latar pendidikan yang rendah, dengan dikembangkannya wilayah mereka, program peningkatan kapasitas tentu saja menjadi prioritas utama bagi mereka untuk mendukung destinasi serta berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan destinasi pariwisata. Program-program ini secara keseluruhan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. *Trend* wisata dunia saat ini menunjukkan meningkatnya permintaan kunjungan ke destinasi ekowisata di seluruh dunia akibat perubahan kesadaran akan isu penyelamatan lingkungan dan global warming. Disamping itu, wisatawan mempunyai keinginan yang tinggi untuk merasakan pengalaman baru dalam berbagai macam kegiatan di alam, situs-situs arkeologi, sejarah atau berinteraksi dengan adat, budaya serta atata cara hidup masyarakat setempat. Dalam dua *decade* terakhir, *trend* permintaan ke *nature based tourism* di negara-negara berkembang menunjukkan perkembangan yang significant dibandingkan ke destinasi-destinasi biasanya. Dan ini membuka peluang bagi masyarakat di daerah pinggiran (pedesaan) untuk terlibat secara aktif mengembangkan dan membangun secara serius destinasi pariwisata di daerah mereka (Garraway, 2008: 90).

Community based tourism (selanjutnya disebut CBT) adalah sebuah konsep pengembangan komunitas yang akan menguatkan kemampuan komunitas masyarakat di pedesaan dalam rangka mengatur potensi sumber daya pariwisata yang tersedia sambil memastikan keterlibatan komunitas lokal tersebut dalam kegiatan itu (Jamal & Stronza, 2009: 135). Dari beberapa penelitian di berbagai negara CBT dapat membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan ekonomi, melestarikan adat dan budaya serta lingkungan alam sekitarnya serta meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan berbagai kesempatan pelatihan dan pendidikan. (Chen et al., 2015).

CBT memperluas fungsi keterlibatan atau partisipasi komunitas masyarakat yang paling bawah dalam pembangunan khususnya di bidang pembangunan pariwisata. Mereka harus terlibat aktif dalam perencanaan, memutuskan, menjalankan program serta mengatur semua kegiatan pariwisata yang berada di sekitar mereka.

Keterlibatan komunitas masyarakat ini dapat bermacam-macam tergantung kebutuhan fasilitas yang disediakan untuk wisatawan yang datang ke sana seperti; menyiapkan jasa akomodasi, transportasi, makanan, pemandu lokal, penari atau pemain musik, pengrajin *handicraft* atau yang terkait lainnya. CBT harus dijalankan, diusahakan, dimiliki dan di kelola oleh masyarakat itu sendiri.

CBT membutuhkan pendekatan yang sistematik dan terus menerus, mulai dari awal dengan mempelajari potensi dan kemampuan serta kemauan masyarakat di satu wilayah (bisa satu desa atau mungkin hanya bagian dari satu desa) untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan pariwisata, serta memonitor perkembangannya dan mengevaluasi efek negatifnya (Kiss, 2004: 76).

Untuk inisiasi awal biasanya pengembangan pembangunan pariwisata berbasi komunitas ini sering kali diinisiasi oleh pemerintah setempat, NGO, industri tetapi banyak juga yang memang diinisiasi oleh komunitas tersebut sendiri yang memang sudah menyadari potensi yang ada di sekitar mereka.

Tentu perlakuan awal dari program ini akan berbeda-beda dikarenakan jika program ini di inisiasi oleh mereka sendiri, mereka sudah mulai paham apa itu pariwisata, ekses positif dan negatifnya dan dimana mereka akan berperan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Berbeda ketika program ini diinisiasi oleh pemerintah, NGO atau industri/swasta, dimana mereka yang melihat peluang dan potensi yang ada dan kemudian harus menjabarkan kepada komunitas atau masyarakat tersebut serta mensosialisasikannya secara jelas akan ekses positif dan negatif dari pengembangan pariwisata tersebut.

Ada beberapa faktor sukses dalam membangun sebuah program CBT (Schandl et al., 2016) yaitu: Keterlibatan komunitas dalam perencanaan dan peningkatan kapasitas mereka untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mengatur dan mengelola program pengembangan pariwisata di wilayah mereka. Bekerja sama dan berkolaborasi untuk memfasilitasi pengembangan program (terutama ditahap awal berkaitan dengan sumber keuangan) memberdayakan komunitas/masyarakat setempat dalam pengelolaan. Fokus pada tujuan untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan lingkungan sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan. Bekerja sama dengan pengambil kebijakan/pemerintah, institusi swasta yang dapat membiayai dan memfasilitasi sarana dan prasarana. Fokus untuk pengembangan dan pembangunan yang berkelanjutan di waktu yang lama.

Selain faktor-faktor yang menentukan kesuksesan pembangunan CBT pada suatu tempat, terdapat juga faktor-faktor yang menjadi penghalang kesuksesan dari pengembangan program CBT yaitu: sumber pembiayaan, pemasaran destinasi atau mendatangkan wisatawan, pengembangan produk wisata (Produk yang belum siap dipasarkan), Program Peningkatan kapasitas komunitas/pemberdayaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Dengan kualitas tertentu, terutama sebagai dasar untuk membangun pengetahuan; Penelitian ini dihadapkan pada data atau teks yang tersedia, penelitian ini bekerja secara langsung dengan sumber-sumber yang sudah ada di perpustakaan, atau data yang siap digunakan (Yusuf, 2014). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder; Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu: buku/artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini; sedangkan sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu: buku/artikel berperan sebagai pendukung buku/artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku/artikel primer (Soekanto, 2003: 45). Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu mengkaji atau menginterpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tersebut bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya (Ansari, Raden Muyazin, 2020: 338).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Community Based Tourism* (CBT)

Dalam wacana etimologi *Community Based* diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari tiga suku kata *community*, *based* dan *Tourism*. ‘*Community*’ diartikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah komunitas, masyarakat, komunita, persamaan, himpunan (Fatya, P. A., Rani, A. K., 2014: 63); sedangkan “*Based*” adalah berbasis, pendekatan, pengelolaan (Fatya, P. A., Rani, A. K., 2014: 32); kemudian “*Tourism*” berarti kepariwisataan, pariwisata (Fatya, P. A., Rani, A. K., 2014: 294). Dapat disimpulkan secara umum *Community Based Tourism* adalah pariwisata berbasis masyarakat. Sebagai pemahaman atas *Community Based tourism* itu seperti Sunaryo menyatakan *Community Based Tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat merupakan terlibatnya masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata sehingga masyarakat memperoleh manfaat dari adanya

obyek wisata dengan cara pendampingan masyarakat lokal untuk mengembangkan obyek wisata (Sunaryo, 2013: 139).

Garrod dalam karyanya yang berjudul "*Local Partisipation in the Planning and Management of Eco Tourism A Resived Model Approach*" menyatakan bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha- usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung diperdesaan (Garrod, 2001: 4).

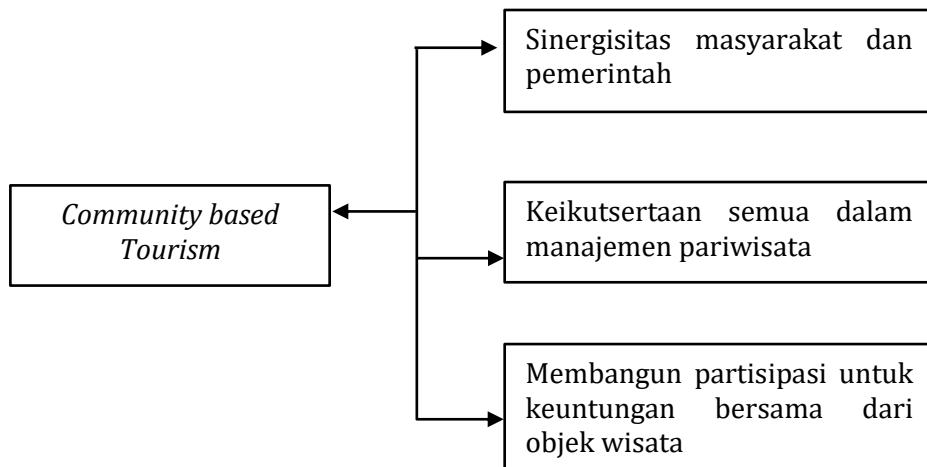
Seperti keduanya, Endah memahami *Community Based Tourism* (CBT) yaitu bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan dari obyek wisata tersebut, dan menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis serta distribusi keuntungan pada kelompok yang kurang beruntung di perdesaan (Endah, 2007: 103).

Menurut Suansri dalam Ahsani dkk, *Community Based Tourism* (CBT) merupakan pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. Konsep ini merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pariwisata (Pramodia Ahsani et al., 2018: 137). Suansri, mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan *Community Based Tourism*. Adapun prinsip tersebut antara lain:

- a. Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata;
- b. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek;
- c. Mengembangkan kebanggaan komunitas;
- d. Mengembangkan kualitas hidup komunitas;
- e. Menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area local;
- g. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas;
- h. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas; dan
- j. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Community Based Tourism* (CBT) seperti dalam gambar berikut:

Gambar 1.1
Community Based Tourism (CBT)



2. Sustainable Tourism

Secara etimologi *Sustainable Tourism* diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata *Sustainable* dan *Tourism*. "*Sustainable*" diartikan dalam kamus bahasa Indonesia adalah berkelanjutan (Fatya, P. A., Rani, A. K., 2014: 64); sedangkan "*Tourism*" berarti kepariwisataan, pariwisata (Fatya, P. A., Rani, A. K., 2014: 294). Dapat disimpulkan secara umum *Sustainable Tourism* adalah pariwisata berkelanjutan.

Definisi yang lebih teknis dapat dipahami pertama kali dikemukakan oleh *the World Commission for Environment and Development* (WCED), yaitu komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan yang didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan pariwisata berkelanjutan dapat diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada masa mendatang (Chamdani, 2018: 67).

Haryanto dalam penghargaan Piagam Pariwisata Berkelanjutan 1995 memahami bahwa pariwisata harus didasari kriteria yang berkelanjutan yang intinya adalah bahwa pembangunan ekologi jangka panjang harus didukung dan pariwisata harus layak secara ekonomi serta adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat lokal, artinya pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang terpadu dan terorganisir untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan (Haryanto, 2014: 96).

Mahdayani menyatakan untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan diperlukan rasa tanggung jawab dan tidak mengakibatkan kerusakan alam dan

budaya serta menghormati adat istiadat destinasi wisata. Wisata berkelanjutan juga dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi kawasan pariwisata dan serta meningkatkan penyediaan jasa disekitar kawasan wisata (Satria, 2009: 68). Selain berfokus pada penjagaan terhadap keaslian suatu daerah (baik alam maupun adat istiadat), pariwisata berkelanjutan juga bisa sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah (Mahdayani, 2009: 14).

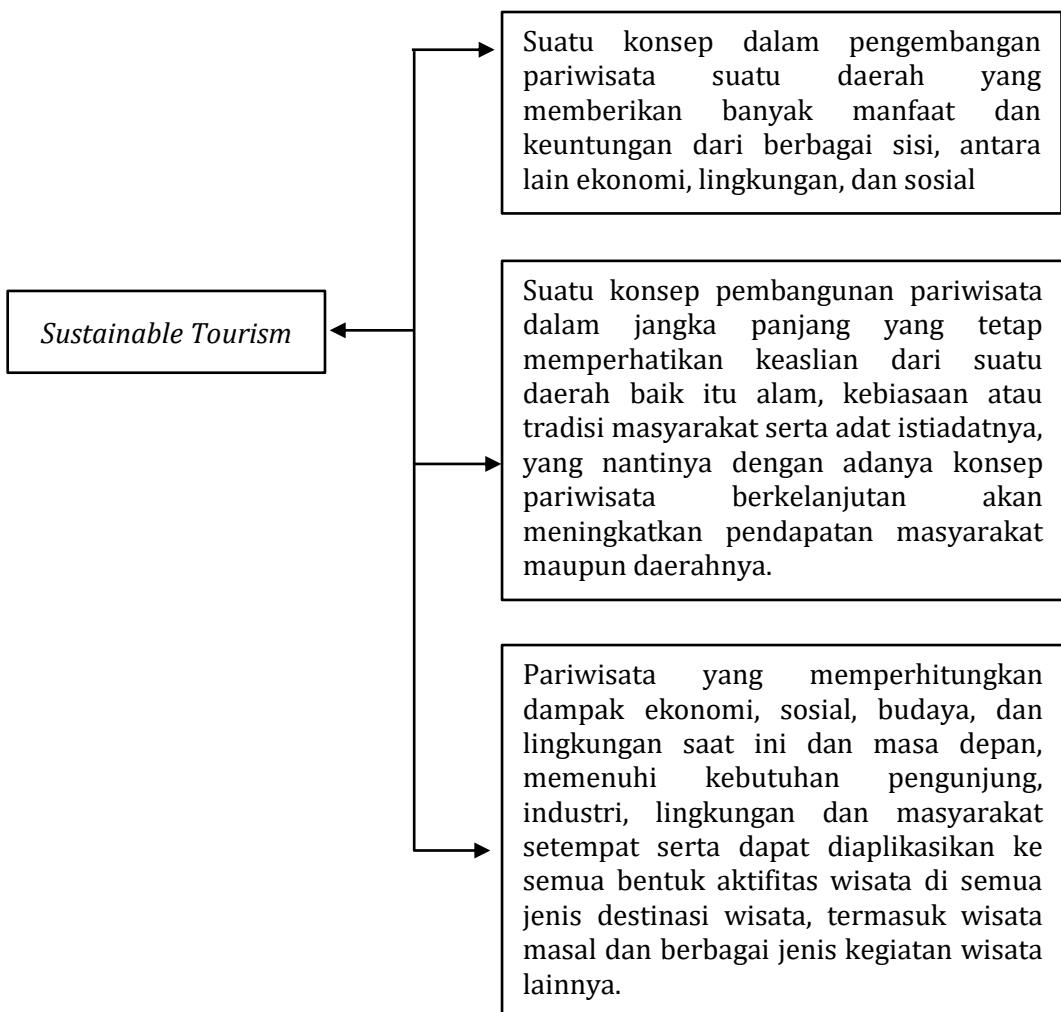
Chamdani pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan upaya terpadu dan terorganisir guna mengembangkan kualitas hidup melalui pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dapat terlaksana dengan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melibatkan partisipasi aktif dan seimbang dari pemerintah, swasta, serta masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait pada isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas (Chamdani, 2018: 28).

PERMENPAR No. 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan menyatakan bahwa Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Sunaryo menyatakan pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan suatu proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju ke suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau diinginkan (Sunaryo, 2013: 138).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Sustainable Tourism* seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.2
Sustainable Tourism



3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui *Community Based Tourism* dan *Sustainable Tourism*

a. Pengembangan Melalui *Community Based Tourism*

Suansri mengungkapkan beberapa point-point aspek utama pengembangan *Community Based Tourism* terdapat dimensi (Suansri, 2003: 21-22), yaitu:

- 1) Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

- 2) Dimensi sosial, dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.
- 3) Dimensi budaya, dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam udaya lokal.
- 4) Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan keperdulian akan perlunya konservasi.

Dimesi politik, dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.

Community Based Tourism (CBT) di tunjukan sebagai alat pengembangan komunitas serta konservasi lingkungan, oleh karena itu tujuan tersebut harus dilihat secara menyeluruh mengenai aspek yang memberikan dampak pada komunitas seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan politik (Setyo, 2018: 86).

Menurut Sunaryo dalam Dhimas, memahami pengembangan *Community-Based Tourism* (CBT) membutuhkan partisipasi masyarakat yang baik, dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat harusnya diajari untuk mengelola destinasi pariwisata sehingga tercapai pariwisata yang berkelanjutan (Setyo, 2018: 89). Dari penjelasan diatas, alat pengukuran *Community Based Tourism* (CBT) terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.

Ciri-ciri khusus dari *Community Based Tourism* (CBT) menurut Murphy, yakni menekankan strategi yang pada identifikasi tujuan masyarakat serta keinginan dan kemampuan mereka dalam menerima manfaat pariwisata sehingga setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal (Murphy, 1985: 153). Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat.

Timothy, mengungkapkan ciri-ciri khusus *Community Based Tourism* (CBT) berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain memiliki ketertarikan atau minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan (Timothy, 2007: 373).

b. Pengembangan Melalui *Sustainable Tourism*

Aronsson dalam Larson dan Herr, menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang interpretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) (Larson & Herr, 2008: 1-13) yaitu:

- 1) Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mampu mengatasi permasalahan sampah lingkungan serta memiliki perspektif ekologis
- 2) Pembangunan pariwisata berkelanjutan menunjukkan keberpihakan-nya pada pembangunan berskala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal atau setempat
- 3) Pembangunan pariwisata berkelanjutan menempatkan daerah tujuan wisata sebagai penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus dengan mengeksplorasi daerah setempat
- 4) Pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk menekankan pada berkelanjutannya budaya, dalam hal ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan meninggalkan budaya di daerah tujuan wisata.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Yaman dan Mohd, ditandai dengan empat kondisi (Ramsa Yaman & Mohd, 2004: 584) yaitu :

- a) Anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata;
- b) Pendidikan bagi tuan rumah, perilaku industri dan pengunjung atau wisatawan;
- c) Kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung;
- 5) Investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternatif Indikator yang dikembangkan oleh pemerintah RI tentang pembangunan.

Pariwisata berkelanjutan terdapat beberapa alat ukur yakni menggunakan alat ukur dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT) dan konsep *cittaslow philosophy*. Namun, pada konsep *cittaslow philosophy* dalam penerapannya lebih mengutamakan pada tempat baik dari segi wilayah maupun masyarakat lokal dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Cittaslow Philosophy diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari isu globalisasi pada suatu wilayah dengan meningkatkan *sense of place* melalui kekhasan wilayah dan identitas lokal. *Cittaslow Philosophy* menitik beratkan kekayaan lokal, konsep ini juga mendorong adanya keberlanjutan ekonomi bagi usaha lokal.

Cittaslow Philosophy dapat menjadi alternatif dalam pembangunan kota yang berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat lokal, perlindungan lingkungan dan pelestarian kebudayaan mengungkapkan

destinasi dapat berkembang secara berkelanjutan jika dilakukan dengan langkah-langkah (Mayer & Knox, 2009: 287) sebagai berikut⁶⁶:

- 1) Melindungi dan meningkatkan daya tarik alam dan buatan yang menjadi basis industri pariwisata;
- 2) Menggunakan setiap sumberdaya yang tersedia sesuai dengan nilai dan aspirasi masyarakat lokal masa kini dan yang akan datang, serta menghasilkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan mereka;
- 3) Mengembangkan dan memasarkan produk dengan tepat dengan memperhatikan perbedaan dan daya saingnya, sehingga tetap mampu secara fleksibel merespon perubahan pasar;
- 4) Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap kemajuan ekonomi di destinasi dan melakukan promosi berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan daya tarik destinasi, menjamin kesesuaian promosi dengan fakta destinasi, mendorong pertambahan kunjungan-ulang dan meningkatkan reputasi destinasi.

Pariwisata berkelanjutan hendaknya memperhatikan :

- 1) Memastikan aspek ekonomi jangka panjang dengan cara menyediakan manfaat ekonomi bagi semua stakeholders yang didistribusikan secara merata.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya lingkungan, dengan cara mempertahankan proses ekologi esensial dan membantu konservasi warisan alam dan *biodiversity*.
- 3) Menghormati sosial dan budaya masyarakat lokal, dengan cara melindungi warisan bangunan, warisan budaya hidup, dan nilai tradisional serta berkontribusi pada pemahaman antar budaya dan toleransi.

Dari penjelasan di atas pariwisata berkelanjutan adalah suatu pariwisata dimana dapat meminimalisir dampak negatif dan berdampak pada pariwisata yang akan datang dengan memenuhi beberapa aspek yakni ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

4. Prinsi-Prinsi Pengembangan Wisata melalui *Sustainable Tourism*

Tabel 1.1
Prinsi-Prinsi Pengembangan Wisata

No	Prinsip-Prinsip	Penjelasan Deskriptif
1	Partisipasi	a. Mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan baik perlu adanya peran dari masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap pembangunan pariwisata dengan ikut serta dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber daya yang

		<p>akan dipelihara dan ditingkatkan serta mengembangkan tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan pada daya tarik wisata.</p> <p>b. Masyarakat lokal juga besar peranannya dalam pelaksanaan atau pengimplementasian strategi yang telah disusun.</p>
2	Keikutsertaan para pelaku/Stakeholder Involvement	<p>a. Meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok suka relawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, juga pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan, serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pembangunan pariwisata berkelanjutan.</p> <p>b. Mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan peranan dari pihak terkait atau <i>stakeholder</i> penting peranannya, karena berhasil tidaknya suatu pembangunan dilihat dari kontribusi <i>stakeholder</i>.</p>
3	Kepemilikan Lokal	<p>a. Menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat lokal. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran dan sebagainya seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat.</p> <p>b. Mewujudkan kepemilikan lokal, tentunya sangat membutuhkan pelatihan dan pendidikan bagi penduduk lokal serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis atau wirausahawan lokal.</p>
4	Pembangunan Sumber Daya yang Berkelanjutan	<p>a. Kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (<i>irreversible</i>) secara berlebihan.</p> <p>b. Didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan.</p> <p>c. Menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.</p> <p>d. Mendukung tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaannya harus memanfaatkan sumber daya yang dapat dilakukan pembaharuan sampai dimasa yang akan.</p>

5	Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya kondisi yang harmonis antara pengunjung atau wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud. b. Masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menjaga serta merawat pariwisata yang ada di daerahnya.
6	Daya Dukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. b. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara regular sehingga dapat ditentukan penyesuaianya atau perbaikan yang dibutuhkan.
7	Monitor dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak dari pariwisata. b. Adanya monitor dan evaluasi (monev) maka program atau kegiatan yang sedang dikerjakan akan selalu diawasi keberlangsungannya dan apabila ada kesalahan ataupun kekurangan akan langsung dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program atau kegiatan tersebut.
8	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan pembangunan. b. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber yang ada tidak dieksplorasi secara berlebihan.
9	Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis atau berwirausaha, <i>vocational</i>, dan <i>professional</i>. b. Pelatihan meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan. c. Mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah tentang daya manusia yang berkualitas dan perlu adanya proses peningkatan kemampuan serta pemahaman pada masyarakat berkaitan dengan cara bagaiman mengelola pariwisata.

5. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Wisata

Peran serta masyarakat tentunya akan timbul karena adanya manfaat langsung yang didapatkan dari lingkungan sekitar pariwisata. Agar dapat memberikan manfaat, maka lingkungan tersebut harus terus dijaga. Dalam kegiatan pariwisata, jika kelestarian lingkungan sekitar daerah pariwisata dijaga dengan baik, maka masyarakat yang akan mendapatkan keuntungannya secara ekonomi (Mahdayani, 2009: 20). Menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari proses pembangunan pariwisata. Kelestarian lingkungan objek wisata yang terjaga, tentunya akan meningkatkan nilai jual pariwisata tersebut baik di kancan domestik maupun mancanegara.

Listyaningsih menyatakan apapun yang menjadi tujuan pembangunan, sesungguhnya pembangunan masyarakatlah yang harus diperhatikan. Posisi masyarakat bukan menjadi obyek pembangunan tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat juga menjadi subjek pembangunan. Jadi dalam proses pembangunan, masyarakat juga memiliki peranan dalam penentuan arah pembangunan dan menjadi pelaku pengawasan terhadap suatu pembangunan (Listyaningsih, 2014: 127).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta agar masyarakat mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan pariwisata memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat (lokal), sehingga penting peranan dari masyarakat dalam mengawasi dan ikut serta dalam pembangunan pariwisata untuk memastikan kebijakan tersebut terealisasikan.

Santosa dalam Nofriya menyatakan bahwa pembangunan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat sering menyebabkan rasa terpinggirnya di antara masyarakat setempat sehingga dapat menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan kalangan investor pariwisata dan pemerintah (Nofriya, 2016: 52). Apabila terjadinya konflik antara masyarakat dengan kalangan stakeholder maka nantinya akan mengancam keberlangsungan pembangunan pariwisata itu sendiri. Hubungan masyarakat dengan stakeholder dalam pembangunan pariwisata sangat erat kaitannya, karena masyarakat ikut serta secara aktif dalam pengelolaan ataupun pengembangan pariwisata.

Woodley dalam Nofriya menyatakan "*Local people participation is aprerequisite for sustainable tourism*" (Nofriya, 2016: 53). Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan, agar masyarakat mau ikut berperan serta dalam kegiatan pariwisata yang tidak merusak lingkungan terdapat tiga komponen, yaitu:

- a. *Enabling setting*, yaitu memperkuat situasi di daerah pariwisata termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat berkreatifitas.
- b. *Empowering local community*, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal melalui pendidikan, pelatihan dan berbagai bentuk pengembangan lainnya.
- c. *Socio-political support*, yaitu diperlukan adanya dukungan sosial, dukungan politik, *notworking* oleh pemerintah setempat, dinas pariwisata dan elemen lain yang mendukung.

Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pariwisata dapat berbentuk usaha dagang atau usaha pelayanan jasa baik di dalam maupun di luar kawasan objek wisata. Usaha kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut, akan menciptakan suasana merasa saling memiliki terhadap tempat mata pencaharian yang pada akhirnya nanti masyarakat ikut serta berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Indonesia juga saat ini sudah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang semakin terkenal bukan hanya di kalangan wisatawan lokal, namun keindahan pariwisata Indonesia sudah melang-langbuana hingga masyarakat-masyarakat di berbagai Negara di dunia. Kemajuan pariwisata beriringan dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan di wilayah pariwisata tersebut untuk menunjang infrastruktur pariwisata. Namun, saat ini keberadaan pariwisata dan kemajuannya masih belum bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kenyatannya beberapa provinsi yang menjadi primadona pariwisata di Indonesia masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ini bisa jadi disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih banyak dikuasai oleh para investor. *Community based tourism* merupakan konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, dalam CBT masyarakat di berdayakan untuk mengelola objek wisatanya sendiri. salah satu bentuk dari CBT adalah pengembangan desa wisata. Adapun *Sustainable Tourism* merupakan pariwisata yang mengacu pada prinsip berkelanjutan yang memperhitungkan aspek dan dampak ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata yang bertujuan memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya.

Daftar Rujukan

- Ansari, Raden Muyazin, A., Arifin. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Sebagai Konsep Pembangunan Karakter dalam Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0. *Ar-Risalah: Jurnal Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 18(2), 335–349. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i2.397>
- Bessie, J. L. (2019). Implementasi E-Commerce dalam Industri Pariwisata. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 8(1), 45–62.
- Chamdani. (2018). *Dimensi-dimensi Pariwisata Berkelanjutan*. Deepublish.
- Chen, Z., Zhang, J., Zhang, T., Liu, W., & Liu, J. (2015). Haze observations by simultaneous lidar and WPS in Beijing before and during APEC, 2014. *Science China Chemistry*, 58(9), 1385–1392.
- Endah, S. N. (2007). Community Based Tourism (CBT) Sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata UNAIR*, 20.
- Fatya, P. A., Rani, A. K., (2014). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia Inggris*. Trans Media.
- Garraway, J. (2008a). Ecotourism as a Means of Community Development: The case of the indigenous populations of the Greater Caribbean. *ARA Journal of Tourism Research*, 1(1), 11–20.
- Garraway, J. (2008b). Eco-turismo como un medio de desarrollo comunitario: El caso de la población indígena del Gran Caribe. *ARA: Journal of Tourism Research/Revista de Investigación Turística*, 1(2), 11–20.
- Garrod, B. (2001). *Local Participation in the Planning and Management of EcoTourism A Resived Model Approach*. University of the West of England. Bristol.
- Haryanto, J. T. (2014). Model pengembangan ekowisata dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah studi kasus provinsi DIY. *Jurnal Kawistara*, 4.
- Jamal, T., & Stronza, A. (2009). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: Stakeholders, structuring and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(2), 169–189.
- Kiss, A. (2004). Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds? *Trends in Ecology & Evolution*, 19(5), 232–237.
- Larson, S., & Herr, A. (2008). Sustainable tourism development in remote regions? Questions arising from research in the North Kimberley. *Australia Regional Environmental Change*, 8.

- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu.
- Mahdayani, W. (2009). *Ekowisata Panduan Dasar Pelaksanaan*. UNESCO dan Dinbudpar.
- Mayer, H., & Knox, P. L. (2009). *Small Town Sustainability: Prospects for Collaboration in a Global Age*. Planetizen.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism A Community Approach*. Methuen.
- Nafah, H. K., & Purnaningrum, E. (2021). Penggunaan Big Data Melalui Analisis Google Trends Untuk Mengetahui Perspektif Pariwisata Indonesia di Mata Dunia. *SNHRP*, 3, 430–436.
- Nofriya. (2016). *Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Pariwisata Hijau di Sumatera Barat*. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Lingkungan II.
- Pramodia Ahsani, R. D., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3, 135–146.
- Ramsa Yaman, A., & Mohd, A. (2004). Community-based ecotourism: A new proposition for sustainable development and environmental conservation in Malaysia. *Journal of Applied Sciences*, 4, 583–589.
- Ross, S., & Wall, G. (1999). Ecotourism: Towards congruence between theory and practice. *Tourism Management*, 20(1), 123–132.
- Satria, D. (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3.
- Schandl, H., Hatfield-Dodds, S., Wiedmann, T., Geschke, A., Cai, Y., West, J., Newth, D., Baynes, T., Lenzen, M., & Owen, A. (2016). Decoupling global environmental pressure and economic growth: Scenarios for energy use, materials use and carbon emissions. *Journal of Cleaner Production*, 132, 45–56.
- Setyo, D. N. (2018). Community Based Tourism Tantangan Dusun Nglepen dalam Pengembangan Desa Wisata. *Pariwisata*, 5.
- Soekanto, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. REST Project.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Timothy, D. J. (2007). *Empowerment and stakeholder participation in tourism destination communities*. Tourism, power and space.

Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif. *Kualitatif Dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group.*